

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA GENETIK RUMPUT LAUT
DI KABUPATEN BANTAENG**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
GENETIK RUMPUT LAUT
DI KABUPATEN BANTAENG**



Kepada

27/02/2021

1 ccq
Emb. Alumni

R/0011/IPM/21 CP
WAR

5

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng.

Nama Mahasiswa : Wisma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11156 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Ansyari Mone, M.Pd


Hamrun, S.IP., M.Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0155/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Jumat 05 Februari 2021.



Ketua

[Signature]

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Sekretaris

[Signature]

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Ahmad Harakan , S.IP., M.HI (ketua)
2. Hamrun, S.IP., M.Si
3. Nur Khaerah, S.IP., M.IP

[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)
[Signature]
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wisma Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11156 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 5 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Wisma Wardhani

ABSTRAK

Wisma Wardhani, 2020. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng. (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Hamrun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu kepala dinas kelautan, kepala bagian kelautan dan pesisir, kelompok tani rumput laut dan pembeli. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut karena pemerintah didukung oleh strategi kebijakan yang pro-rakyat sehingga masyarakat ingin terlibat langsung dalam pembangunan seperti halnya pengembangan masyarakat pesisir. Di antara strategi tersebut adalah dengan menggunakan bibit unggul yang berasal dari pemerintah, penanaman rumput laut dengan cara pemilihan air laut yang sesuai, dan pelaksanaan panen yang sesuai dengan waktu yang di tentukan. Keberhasilan para petani rumput laut karena disamping dukungan penuh dari pemerintah, aspek alam Kabupaten Bantaeng memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai daerah penanaman rumput laut khususnya di daerah pesisir Kabupaten Bantaeng. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng, Faktor pendukung dari pemerintah adalah proses pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para petani secara berkelanjutan dan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang pemberdayaan masyarakat pesisir tertuang dalam Perda Kabupaten Bantaeng. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap sektor pembangunan sehingga perlu adanya gerakan penyuluh dalam mendampingi masyarakat. penghambat lain adalah tidak adanya akses yang menentu untuk melakukan kerjasama dengan jaringan yang lebih besar dalam pengembangan rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

Kata Kunci : Strategi, Pengembangan Sumber Daya Genetik, Rumput Laut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Hamrun, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

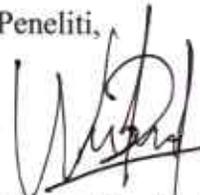
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu dan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Dinas Kelautan Kabupaten Bantaeng yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda H.Syahril dan Ibunda Hj.Wahida yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 5 februari 2021

Peneliti,



Wisma Wardhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMA TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Tentang Strategi	13
1. Pengertian Strategi	13
2. Tingkat-tingkat Strategi	18
3. Jenis-Jenis Strategi	20
4. Perumusan Strategi	21
C. Strategi pemerintah Dalam Pengembangan SDG Rumput Laut	23
D. Kerangka Pikir	32
E. Fokus Penelitian	33
F. Deskripsi Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng	50

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHUUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Maritim yang memiliki beribu-ribu pulau dengan area teritorial laut yang sangat luas. Daratan Indonesia seluas 1.904.569 km² dan lautannya seluas 3.288.683 km² yang membentang sepanjang khatulistiwa dan terletak antara benua Asia dan Australia. Bagi masyarakat yang berada di pesisir atau kepulauan yang berjiwa Maritim diperlukan kepandaian dalam menaklukkan lautan luas serta pandai mengarungi lautan dengan melakukan pelayaran ke berbagai daerah lainnya baik untuk berdagang maupun untuk mencari ikan.

Pada umumnya, masyarakat pesisir yang tersebar di kawasan pesisir pantai umumnya bekerja sebagai pelaut atau lebih dikenal dengan sebutan nelayan. Namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki banyak nelayan berhenti melaut. Keterbatasan itu adalah kurangnya lahan untuk penangkapan ikan, dan ditambah lagi tidak adanya alat berteknologi tinggi yang dapat mendukung proses penangkapan ikan.

Berbagai peluang yang ada pada hasil kelautan rumput laut mampu diciptakan sebagai produk unggulan ekspor dunia. Namun, tingginya peluang rumput laut tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan usaha yang mampu memanfaatkan sumber daya rumput laut yang mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi semua stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam industri budidaya rumput laut. Saat ini,

pemanfaatan rumput laut hanya terbatas pada ekspor barang mentah sebesar 50% dari jumlah rumput laut yang 2 dihasilkan oleh para petani laut (Kemendag, 2013). Pengendalian ekspor rumput laut di Indonesia akan dirancang melalui proses ekspor rumput laut yang banyak mengirimkan bahan mentah diganti dan diarahkan kepada rumput laut olahan pangan (KKP, 2016).

Perdagangan rumput laut antar negara berupa ekspor memberi indikasi bahwa hampir seluruh produk rumput laut nasional (Akrim, Dirawan & Rauf, 2019), khususnya jenis *Eucheuma cottoni* sp digunakan untuk memenuhi pasar ekspor yang mencapai 80.64%. Selanjutnya terus mengalami pertumbuhan sekitar 15% selama dua puluh tahun terakhir yang memberi kontribusi sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, kendala yang dihadapi oleh Indonesia yakni keberadaan rumput laut yang mudah terserang penyakit seperti ice-ice, pertumbuhannya lama, dan musim sehingga menjadi permasalahan yang dialami pembudidaya dalam ketersediaan bibit rumput laut melakukan kegiatan pembibitan (penanaman bibit) dari hasil produksi sebelumnya, sehingga bibit yang dihasilkan kurang baik karena mengalami penurunan genetik.

Pengaturan mengenai sumber daya genetik selama ini erat kaitannya dengan rezim perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia mengakomodir perlindungan terkait dengan sumber daya genetik, yang lebih sering dikenal dengan sebutan *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*. Pada beberapa negara, perlindungan terhadap sumber daya

genetic diatur dalam pengaturan paten ataupun perlindungan terhadap varietas tanaman.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan bibit rumput laut di Indonesia salah satu caranya yakni melalui perbanyakan secara kultur jaringan. Perbanyakan bibit rumput laut secara in-vitro ini memiliki beberapa keunggulan antara lain, bebas dari penyakit, bersifat seragam, memiliki multivikasi thallus yang relatif tinggi, pertumbuhannya cepat serta baik secara kualitas dan kuantitas. Perkembangan teknik kultur jaringan dan kultur sel memberikan prospek yang menjanjikan bagi pengembangan, dan peluang yang besar pada manipulasi genetik, propagasi tanaman dan produksi tanaman komersil. Kesuksesan teknik-teknik kultur pada tumbuhan tingkat tinggi mendorong pengembangannya pada rumput laut yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan peningkatan produksi rumput laut. Kultur jaringan rumput laut dengan menggunakan teknik induksi kalus banyak digunakan untuk propagasi klon dan perbaikan mutu genetik untuk mendukung ketersediaan benih yang kontinyu dan berkualitas.

Penduduk daerah pantai dan kepulauan di Indonesia, secara umum sudah sejak lama memanfaatkan rumput laut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Rumput laut merupakan sumberdaya kelautan dan perikanan yang selama 5 tahun terakhir mulai dikembangkan oleh masyarakat tani/nelayan di sepanjang pantai karena selain pemeliharaannya mudah juga memiliki keunggulan ekonomis (Akrim, Dirawan & Rauf, 2019).

Rumput laut merupakan komoditas penting perikanan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, selain sebagai bahan makanan, juga merupakan bahan baku dalam industri pembuatan obat-obatan dan kosmetik sehingga kebutuhan pemanfaatan rumput laut semakin meningkat baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk permintaan ekspor. Berdasarkan visi Menteri DKP 2010 dalam program peningkatan produksi perikanan, menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk perikanan terbesar dunia di tahun 2015 dan rumput laut menjadi komoditas unggulan dalam program ini disamping komoditas lainnya (Nurdjana, 2010).

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 sampai 2029 yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah dengan sektor kelautan dan perikanan yang sangat potensial. Masing-masing wilayah tersebut memiliki potensi kelautan dan perikanan yang berbeda-beda.

Dalam menopang kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Bantaeng, banyak masyarakat beralih pada pembudidayaan rumput laut. Proses ini seakan menjadi lahan basah kepada para nelayan yang berada pada masyarakat pesisir Pa'jukukang di Kabupaten Bantaeng. Hanya saja dalam pendistribusian hasil panen rumput laut memunculkan kekhawatiran yang sangat mendalam. Sebab, masyarakat tidak mampu memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini diakibatkan karena pangsa pasar dan harga

rumpun laut yang ada di Kabupaten Bantaeng tidak sebanding dengan jerih payah petani rumput laut.

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang potensial untuk pengembangan rumput laut karena memiliki panjang pantai \pm 35 km dengan luas 343.79 km², berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng dari tahun 2013 - 2017, tidak heran jika sebagian penduduk Kabupaten Bantaeng yang bermukim di wilayah pesisir memilih pembudidayaan rumput laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian mereka, karena kemudahan proses produksi yang terdapat dalam usaha tani rumput laut menyebabkan penduduk banyak menjadikan usaha tani rumput laut sebagai mata pencaharian mereka. Ditetapkannya Kabupaten Bantaeng sebagai sentra pengolahan rumput laut didukung oleh potensi lahan budidaya dan masyarakat pesisir dalam membudidayakan rumput laut sebagai mata pencaharian utama. Perkembangan kegiatan rumput laut yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng bisa dilihat dari pendapatan dan area budidaya yang terus meningkat.

Produksi rumput laut mengalami fluktuasi. Hal itu terbukti pada produksi rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang mengalami peningkatan dan penurunan hal ini terlihat pada tahun 2013 produk rumput laut mencapai 8.971,1 ton kemudian tahun 2014 mengalami peningkatan produksi menjadi 10.676,9 ton, tahun 2015 turun menjadi 9.693,2 ton, kemudian terjadi peningkatan kembali menjadi 13.150 ton dan tahun 2017 terjadi penurunan kembali mencapai 10.740 ton. Naik turunnya produksi rumput laut tergantung

pada faktor-faktor produksi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu dari aspek teknis usaha budidaya rumput laut mudah dilakukan dan waktu pemeliharaan relatif singkat, sedangkan dari aspek ekonomi usaha menguntungkan karena biaya pemeliharaan murah. Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng 2018.

Produksi rumput laut di Kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 menjadi tahun dimana produksi budidaya rumput laut mencapai angka 84.076/Ton, ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar 9.693/Ton. Hal ini menunjukkan tingkat perkembangan produksi rumput laut yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Bantaeng.

Pada tahun 2019, Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Bantaeng Menggelar Sosialisasi Asuransi Budidaya dan cara Budidaya Rumput Laut Sistem Ramah Lingkungan. Kegiatan ini diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari kelompok Tani Rumput 2 Kecamatan yakni Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Karena selama ini petani rumput laut menggunakan pelampung pelampung yang terbuat dari kemasan botol botol plastik, sekarang ada solusi bagi petani itu, yakni mereka mengganti pelampung dari botol plastik itu dengan sejenis pelampung ramah lingkungan. Kalau pelampung plastik digunakan palingan satu atau dua kali panen itu sudah diganti dan itu menambah limbah. Jika menggunakan pelampung ramah lingkungan jangka waktunya panjang dengan

demikian dapat mengurangi limbah yang ada dalam perairan dan produksi rumput laut juga sedikit meningkat dari sebelumnya.

Sedangkan tujuan digelarnya sosialisasi tersebut adalah untuk merangkul dan merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya menggunakan botol plastik atau limbah, sekarang dengan menggunakan pelampung ramah lingkungan atau ecofloat. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan petani rumput laut agar lebih sejahtera. Sosialisasi Budidaya Rumput Laut tersebut merupakan salah satu strategi menarik dari pemerintah untuk berkembangnya sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng sendiri dan menjadi bukti bahwa di tahun 2019 perkembangan rumput laut cukup signifikan pula.

Fenomena yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana kebijakan pemerintah (DKP Bantaeng) terhadap pengembangan sumber daya rumput laut di Kabupaten Bantaeng serta peran pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap usaha rumput laut sehingga akan mempengaruhi strategi pengembangan usaha yang ada dalam meningkatkan pendapatan petani rumput laut. Olehnya peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian strategi pemerintah daerah pada fokus yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Berikut ini merupakan matriks tentang penelitian terdahulu :

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Nur, Bulkis, Darma, & Tuwo, 2020) Dengan judul "Strategi Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Murante Kecamatan Suli Kabupaten Luwu"	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan petani rumput laut	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksploratoris yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang yang ada dan memberikan penjelasan tentang kondisi yang ada secara mendalam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembudidaya rumput laut bertanggung jawab untuk meningkatkan skala usaha melalui perluasan areal tambak dan optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja keluarga sebagai bentuk efisiensi. Prioritas strategis pemberdayaan pembudidaya rumput laut adalah: (1) mengaktifkan peran pemerintah dan instansi terkait dalam pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan dalam penerapan inovasi teknologi terkini, peningkatan kualitas. dan pemanfaatan bantuan modal ventura; (2) meningkatkan sumber modal; (3) mengembangkan pola kerjasama kemitraan pasar; (4) bantuan teknis dan non

				teknis kepada petani; (5) penentuan kalender tanam; (6) penyuluhan dan pelatihan pasca panen; (7) mengganti benih baru; dan (8) perluasan areal budidaya.
2.	(Hadiyan & Haryjanto, 2018) dengan judul "Strategi Konservasi Sumberdaya Genetik Tanaman Potensial Mendukung Restorasi Gambut".	Pendekatan kemitraan/sinergitas antara lembaga pemerintah, kalangan swasta dan masyarakat dalam program konservasi SDG Jenis Tanaman Potensial untuk Mendukung Restorasi Gambut.	Metode review pustaka dari berbagai sumber seperti prosiding, website, jurnal dan media lainnya. Analisis diskriptif dilakukan untuk mengelaborasi pendekatan kegiatan konservasi SDG jenis tanaman potensial pada lahan gambut. Pendekatan/strategi konservasi dimaksud difokuskan pada 2 strategi adalah eks situ dan in situ.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Degradasi hutan rawa gambut (peatland) terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan terus meningkat sejak banyak terjadinya penebangan liar, kebakaran hutan dan konversi gambut untuk keperluan pertanian dan industri. Salah satu dampak buruk yang timbul, adalah hilangnya beberapa sumberdaya genetik jenis tanaman baik yang telah diketahui potensinya maupun belum. Rawa gambut menyimpan ratusan jenis tanaman, beberapa tanaman potensial baik komersial maupun untuk keperluan restorasi gambut mulai langka. Pendekatan konservasi SDG tanaman potensial pada lahan gambut dapat dilakukan secara in situ dan ex situ melalui berbagai pertimbangan, ragam bentuk aktivitas dan introduksi teknologi pendukung agar pelaksanaan program konservasi lebih efisien. Program tersebut perlu didesign untuk sekaligus mendukung Prioritas Nasional Restorasi Ekosistem Gambut.
3.	(Nofriya, 2015) dengan judul "Pendayagunaan	Penelitian ini berfokus pada	Metode review pustaka dari berbagai sumber	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

<p>Sumber Daya Genetik Rumput Laut Sebagai Sumber Energi Alternatif di Masa Depan”.</p>	<p>Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Rumput Laut sebagai Sumber Energi Alternatif.</p>	<p>seperti prosiding, website, jurnal dan media lainnya.</p>	<p>semakin menipis dan suatu saat dapat habis sama sekali. Pemakaian energi dari BBM juga menghasilkan polusi dan berakibat pada pemanasan global. Diperlukan upaya pengadaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar yang bersumber dari fosil, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti biofuel. Akan tetapi, proses budidaya beberapa tanaman sebagai sumber biofuel memerlukan lahan cukup luas dan lahan yang tersedia lebih diprioritaskan terhadap lahan budidaya tanaman pangan. Perairan Indonesia sebagai wilayah tropika memiliki sumberdaya plasma nutfah rumput laut sebesar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut dunia. Luas wilayah yang menjadi habitat rumput laut di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar sehingga rumput laut memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber bietanol tanpa harus menggunakan lahan yang dapat digunakan untuk kebutuhan pangan. Teknik yang dilakukan adalah dengan proses hidrolisa, fermentasi, kemudian dilakukan pemurnian dengan distilasi.</p>
---	--	--	--

Secara umum, penelitian diatas tidak ada yang membahas secara spesifik tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut. Terlebih tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut. Penyusun juga merasa kesulitan dalam menemukan penelitian terdahulu tentang hal tersebut. Sehingga yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini akan fokus pada strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan rumput laut.

B. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *streteus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Heene, dkk, 2010).

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (Akdon, 2011) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi

dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kemudian strategi menurut Salusu (Rizkita & Hakim, 2018) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Berdasarkan penjelasan diatas, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang diciptakan diharapkan dapat disesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Strategi yang mampu menyesuaikan antara kemampuan dan sumber daya organisasi dengan lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Goldworthy dan Ashley ada Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi, yang pertama ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan tidak hanya masa sekarang, lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana, lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan, kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus

mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas yang sangat esensial lalu strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang” (Aliyanti, 2019).

Kemudian dalam strategi yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan ialah seperti pendapat Donelly dalam bukunya ada enam informasi, Yang pertama apa yang akan dilaksanakan kemudian mengapa demikian suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan hal sebelumnya, lalu siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoprasionalnkan strategi, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi, lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengoprasionalnkan strategi, dan hasil apa yang diperoleh dari strategi tersebut (Sari, 2015).

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungan masyarakat.

Menurut (David, 20112) Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi

dan mengevaluasi strategi”. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai “*action stage*” dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menterjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.

Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor

internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini, mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

Adapun 3 tahap untuk menentukan strategi utama berdasarkan konsep (David, 20112) yaitu:

- a. bertujuan untuk menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi-strategi.
- b. bertujuan untuk memunculkan strategi-strategi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui penggabungan faktor eksternal dan internal.
- c. bertujuan untuk menggunakan input informasi dari tahap yang pertama untuk mengevaluasi secara objektif strategi-strategi alternatif dari hasil Tahap 2 yang dapat diimplementasikan, sehingga bisa memberikan suatu basis objektif bagi pemilihan strategi-strategi yang paling tepat.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tingkat-Tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *enterprise strategy* (Strategi Respon Masyarakat), *corporate strategy* (Strategi Organisasi), *business strategy* (Strategi Pasar) dan *functional strategy* (Strategi Pendukung)

a. *Enterprise Strategy* (Strategi Respon Masyarakat)

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit.

c. *Business Strategy* (Strategi Pasar)

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional strategi* (Strategi Pendukung)

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis *strategi functional* yaitu :

- 1) Strategi Functional Ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi Functional Manajemen mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling*,

staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan inregrating.

- 3) Strategi Isu Stratejik fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

3. Jenis-Jenis Strategi

Banyak organisasi menjalankan dua strategi atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat beresiko jika dijalankan terlalu jauh. Diperusahaan yang besar dan terdiversifikasi, strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Organisasi yang berjuang untuk tetap hidup mungkin menggunakan gabungan dari sejumlah strategi defensive, seperti divestasi, likuidasi dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Menurut (David, 20112), jenis-jenis strategi sebagai berikut :

a. Strategi integrasi

Integrasi kedepan, integrasi kebelakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan atau pesaing.

b. Strategi intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif, karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak

ditingkatkan.

c. Strategi diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk dan jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal.

d. Strategi divensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

4. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi yaitu :

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*)

dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Pada uraian di atas penulis akan menguraikan strategi yang diungkapkan oleh Hofer (Chaniago, 2014) mempunyai langkah-langkah perumusan dan pelaksanaan strategi yaitu :

- 1) Formulasi sasaran
- 2) Identifikasi sasaran dan strategi sasaran
- 3) Analisis lingkungan
- 4) Analisis sumber daya kekuatan dan kelemahan perusahaan
- 5) Identifikasi peluang dan ancaman strategis
- 6) Analisis sepanjang penentuan tingkat perubahan yang diperlukan untuk strategi sekarang
- 7) Pengambilan keputusan strategis
 - a) Kembangkan Alternative
 - b) Evaluasi Alternative
 - c) Pilih Alternative
 - d) Implementasi Strategi
 - e) Pengukuran Dan Pengendalian Kemajuan

Dalam hal keorganisasian pemerintah maka strategi yaitu *Enterprise Strategy* yang berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan demi kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera (Anwar, 2013).

Setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah pasti menginginkan daerah yang dipimpinnya menjadi lebih baik dan lebih maju dalam berbagai bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini juga sesuai dengan amanah dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi pemerintah daerah untuk menjadi strategis bukanlah hal yang wajar dan tidak mudah bagi pemerintah, tetapi bukan juga hal yang mustahil untuk mencapainya. Disinilah diperlukan suatu usaha yang maksimal dan dukungan dari semua pihak sehingga segala yang dicita-citakan akan tercapai demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Fiandana, 2015).

Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (Pemerintah) untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya (Rohayatin, 2017).

Pengambilan keputusan menjadi suatu proses yang harus dijalankan pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah diskusi. Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang baik sesuai dengan lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan dalam satu keputusan bersama dan implementasinya menjadi tanggungjawab bersama pula (Muhyadi, 2015).

Dalam dunia birokrasi pemerintah hendaknya bertindak *Comparative Advantage* yaitu merupakan kondisi yang sangat memungkinkan pengambil keputusan untuk mendapatkan strategi yang paling baik. Pada kondisi ini tidak boleh dibiarkan oleh organisasi karena memungkinkan untuk perkembangan organisasi dengan cepat yang memanfaatkan kekuatan dan peluang secara optimal. *Mobilization*, dalam pertemuan antara kekuatan dan ancaman merupakan hal yang berlawanan sehingga diperlukan pergeseran

penyedia keanekaragaman genetik yang ada pada suatu populasi atau spesies. Menurutnya, SDG terdiri dari plasma nutfah tanaman, hewan dan substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

The international Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) menjelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan nilai nyata atau potensial dari tumbuhan bagi pangan dan pertanian. SDG merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia, yang mengandung kualitas yang dapat memberikan nilai atas komponen keanekaragaman hayati, seperti nilai ekologi, genetik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi dan estetika keanekaragaman hayati tersebut dan komponennya.

Merujuk pada pengertian di atas, pengertian SDG (Sumber Daya Genetik) ini meliputi tanaman, hewan atau mikroba yang memiliki unit fungsional hereditas yang bernilai, baik itu secara nyata maupun potensial. SDG mempunyai nilai multidimensi, baik itu nilai ekologi, social, budaya, maupun ekonomi. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG secara komersial, maka nilai ini berarti nilai ekonomi dari SDG tersebut. Masih menurut CBD, materi genetik dapat meliputi benih, potongan, sel dan seluruhnya atau sebagian dari organisme yang memiliki unit fungsional

yang bersifat multidimensi dalam kaitannya dengan SDG bernilai secara komersial dilihat dari nilai ekonominya.

Dalam kaitan ini sumber daya genetik ini bisa dimanfaatkan untuk kultivar dan pemuliaan secara modern, kultivar atau pemuliaan tradisional, penyediaan genetik tertentu (breeding line, mutan, dan seterusnya), spesies domestik yang memiliki hubungan dengan spesies liarnya, varian genetik dari spesies sumber daya liar (Ridwan, 2019). Dengan demikian, jelaslah jika membahas mengenai sumber daya genetik, yang dibahas adalah aspek ekonomi dari sumber daya tumbuhan dan hewan yang dimaksud.

Kerugian global SDG dan degradasi ekosistem, akan berpengaruh pada ketahanan pangan dan gizi, penyediaan dan akses terhadap air dan kesehatan masyarakat miskin pedesaan, serta keseluruhan kesejahteraan orang di seluruh dunia, termasuk generasi sekarang dan masa depan. PT-SDG, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal memberikan kontribusi penting untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan SDG dan aplikasi yang lebih luas dapat mendukung kesejahteraan sosial dan penghidupan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, SDG (Sumber Daya Genetik) sebagai sumber daya alam/kekayaan alam Indonesia dalam penguasaan oleh negara harus memberikan kemakmuran rakyat yang secara sederhana dapat dikongkretnya antara lain dalam pemerataan pembangunan nasional, peningkatan pendapatan rakyat, penyerapan tenaga kerja, adanya akses

pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Akhirnya, SDG untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat terwujud.

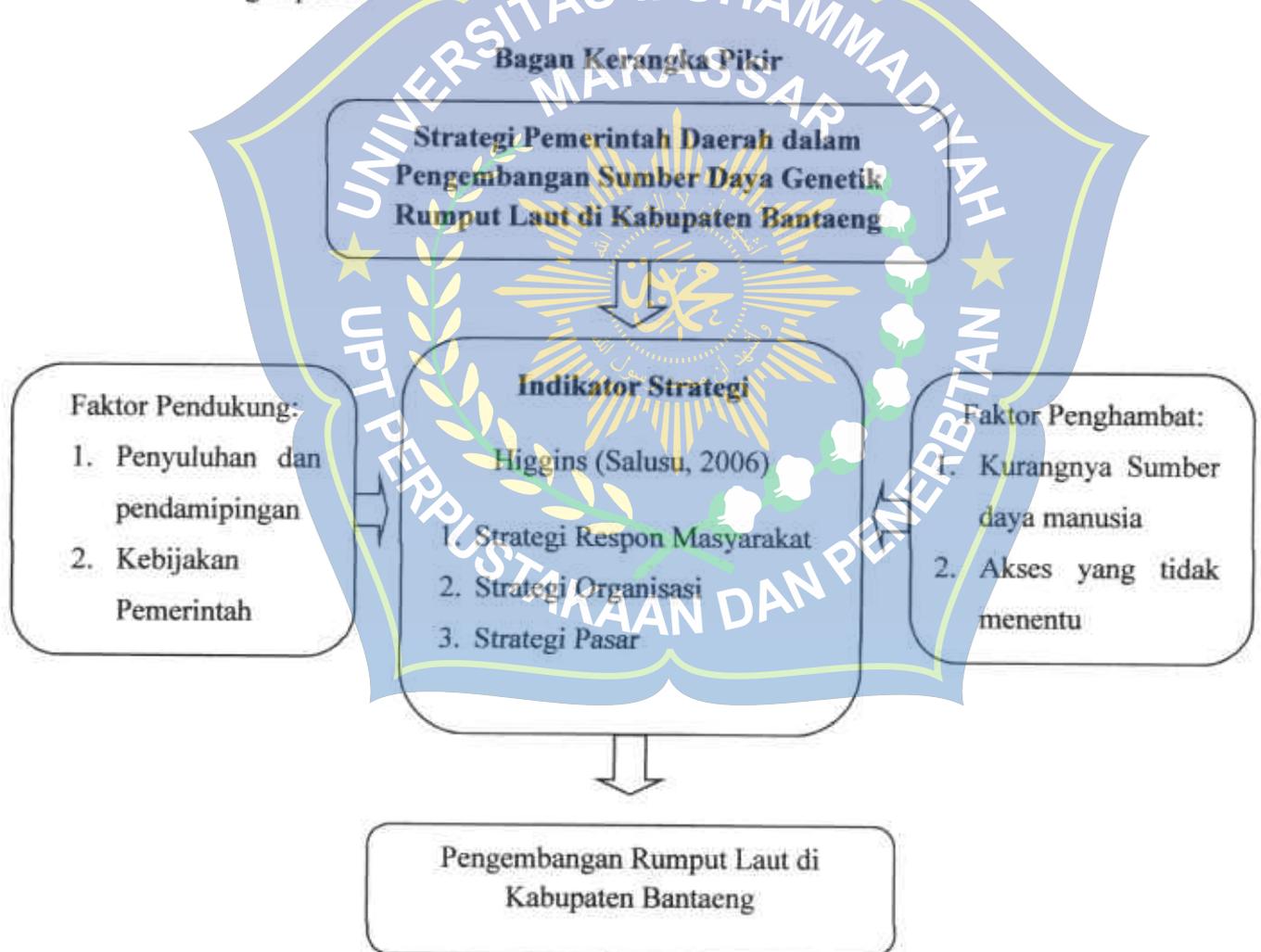
2. Rumput Laut (*Eucheuma spinosum*)

Menurut Winarno rumput laut merupakan bagian terbesar dari tumbuhan laut. Rumput laut dalam bahasa ilmiah dikenal dengan istilah alga. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya rumput laut terdiri atas tiga kelas yaitu *Chlorophyceae* (ganggang hijau), *Phaeophyceae* (ganggang coklat), dan *Rhodophyceae* (ganggang merah). Ketiga kelas ganggang tersebut merupakan sumber produk bahan alam hayati lautan yang sangat potensial dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah maupun bahan hasil olahan (Isnaini, 2017).

Rumput laut *Eucheuma spinosum* tergolong tanaman tingkat rendah, tidak mempunyai akar, batang maupun daun sejati, tetapi hanya menyerupai batang yang disebut thallus, tumbuh di alam dengan melekatkan dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu dan benda keras lainnya. Secara taksonomi dikelompokkan ke dalam divisio Thallophyta (Serdiati & Widiastuti, 2010).

Istilah "rumput laut" dari segi botanis (ilmu tumbuhan) tidaklah tepat, namun karena sudah biasa dipakai dalam istilah perdagangan di Indonesia maka istilah tersebut masih dipakai sampai sekarang. Rumput laut merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Inggris "seaweeds" yang diartikan sebagai tumbuhan pengganggu. Tumbuhan ini bukanlah rumput yang tumbuh di laut karena tidak termasuk rumput (graminae) ataupun tumbuhan pengganggu yang merupakan tumbuhan tingkat tinggi

lingkungan masyarakat, pengembangan sumber daya rumput laut di Kabupaten Bantaeng serta peran pemerintah dan tokoh masyarakat terhadap usaha rumput laut sehingga akan mempengaruhi strategi pengembangan usaha yang ada dalam meningkatkan pendapatan petani rumput laut. Berikut gambar bagan kerangka pikir :



E. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Strategi respon masyarakat
2. Strategi organisasi
3. Strategi pasar
4. Faktor Pendukung:
 - 1) Penyuluhan dan pendampingan
 - 2) Kebijakan pemerintah
5. Faktor penghambat
 - 1) Kurangnya sumber daya manusia
 - 2) Akses yang tidak jelas

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

a. Strategi Respon Masyarakat

Jadi dalam strategi enterprise (respon masyarakat) adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani rumput laut dapat di akses dan dilaksanakan baik oleh masyarakat yang berprofesi sebagai kelompok tani rumput laut dan mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng sehingga mampu meningkatkan taraf hidup petani rumput laut.

b. Strategi organisasi

Strategi yang dimaksud dalam organisasi adalah langkah-langkah pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam merumuskan program yang

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijarah dari sumber data primer dan data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.
2. Data sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan fenomena penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1. Informan Penelitian

No	Nama	Informan
1.	Ir. Rita Simba Pasha, MM	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantaeng
2.	Aidil Akbar, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
3.	Syuhaib Dg Beta	Ketua Kelompok Tani Rumput Laut
4.	Arfah Dg Rola	Ketua Kelompok Tani Rumput Laut
5.	Sulaeman	Perusahaan Swasta Pemasok/Pembeli Pengumpul Rumput Laut

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana arsip-arsip yang dianggap menunjang dan penting dengan persoalan yang akan di teliti baik berupa buku-buku, laporan tahunan, jurnal, karya tulis ilmiah,

dokumen peraturan pemerintah serta undang-undang yang telah ada pada organisasi yang terkait dipelajari, disusun dan dikaji sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna membagikan informasi berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. (Pertama), Reduksi Data, yaitu cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat. (Kedua), Penyajian Data, seperti menyusun data dan mempresentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya. (Ketiga), Menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masih belum

lain guna memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dibuat dengan cara melakukan pemeriksaan dengan wawancara, observasi, atau cara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji memunculkan data yang berbeda, maka akan dilakukan tes secara berulang-ulang sehingga didapatkan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi daerah minapolitan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri No. KEP.32/MEN/2010. Wilayah kawasan Kabupaten Bantaeng yang memiliki daerah topografis dikelilingi dengan pegunungan dan daerah pesisir merupakan lokasi yang tepat sebagai daerah minapolitan. Selain menjadi daerah minapolitan, Kabupaten Bantaeng juga ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan No. KEP.08/DJ-P2HP/2009 yang menunjuk 15 lokasi sentra pengolahan di Indonesia dan Bantaeng berada pada nomor urut 12.

Kabupaten Bantaeng yang didukung dengan wilayah geografis memberikan kelimpahan terhadap keberadaan potensi sumberdaya perikanan dengan kelimpahan ikan-ikan pelagis dan demersal bernilai ekonomis tinggi, wilayah pantai yang subur untuk kegiatan Budidaya rumput laut, maupun kawasan daratan yang memiliki topografi tanah layak untuk melakukan kegiatan perikanan budidaya tambak dan kolam. Selain potensi sumberdaya perikanan, perairan di Kabupaten Bantaeng juga memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata bahari yang hal ini didukung oleh hamparan pasir putih, terumbu karang serta kondisi iklim yang mendukung untuk kegiatan olahraga bahari.

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada $05^{\circ}21'15''$ LS sampai $05^{\circ}34'3''$ LS dan $119^{\circ}51'07''$ BT sampai $120^{\circ}51'07''$ BT. Membentang antara Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Luas wilayah daratan mencapai 395.83 km^2 dan luas wilayah perairan mencapai 144 km^2 . $59,33 \text{ km}^2$ atau sekitar 14,99% dari wilayahnya merupakan daerah pesisir dengan kemiringan 0-2 meter, $168,75 \text{ km}^2$ atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, $81,86 \text{ km}^2$ atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan $83,80 \text{ km}^2$ atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter. Kabupaten Bantaeng mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

Letak geografi Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata setiap bulan 14 mm. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari tiga kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa'jukukang), dan lima kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.



Gambar 4.1 Peta Pemanfaatan Ruang Pesisir Kabupaten Bantaeng
Sumber: RZWPK Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

Tabel 4.1
Luas Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Bantaeng	8.35
2	Bissappu	7.38
3	Pajukukang	41.95

Sumber : DKP Bantaeng, 2018

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk pesisir Kabupaten Bantaeng

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah (jiwa)	Presentasi (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Bantaeng	18.848	19.928	38.776	38
2	Bissappu	15.818	16.847	32.665	32
3	Pajukukang	14.954	15.689	30.643	30
Total		49.620	52.464	102.084	100

Sumber : DKP Bantaeng, 2018

Wilayah Pesisir Kabupaten Bantaeng tergolong cukup besar yaitu 102.084 jiwa dimana terdiri atas 49.620 jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 52.464 jiwa berjenis kelamin perempuan. Wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng di dominasi oleh perempuan yang menerangkan bahwa terdapat potensi sumberdaya manusia dari jenis kelamin perempuan yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha bisnis pengolahan rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

2. Profil Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantaeng

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

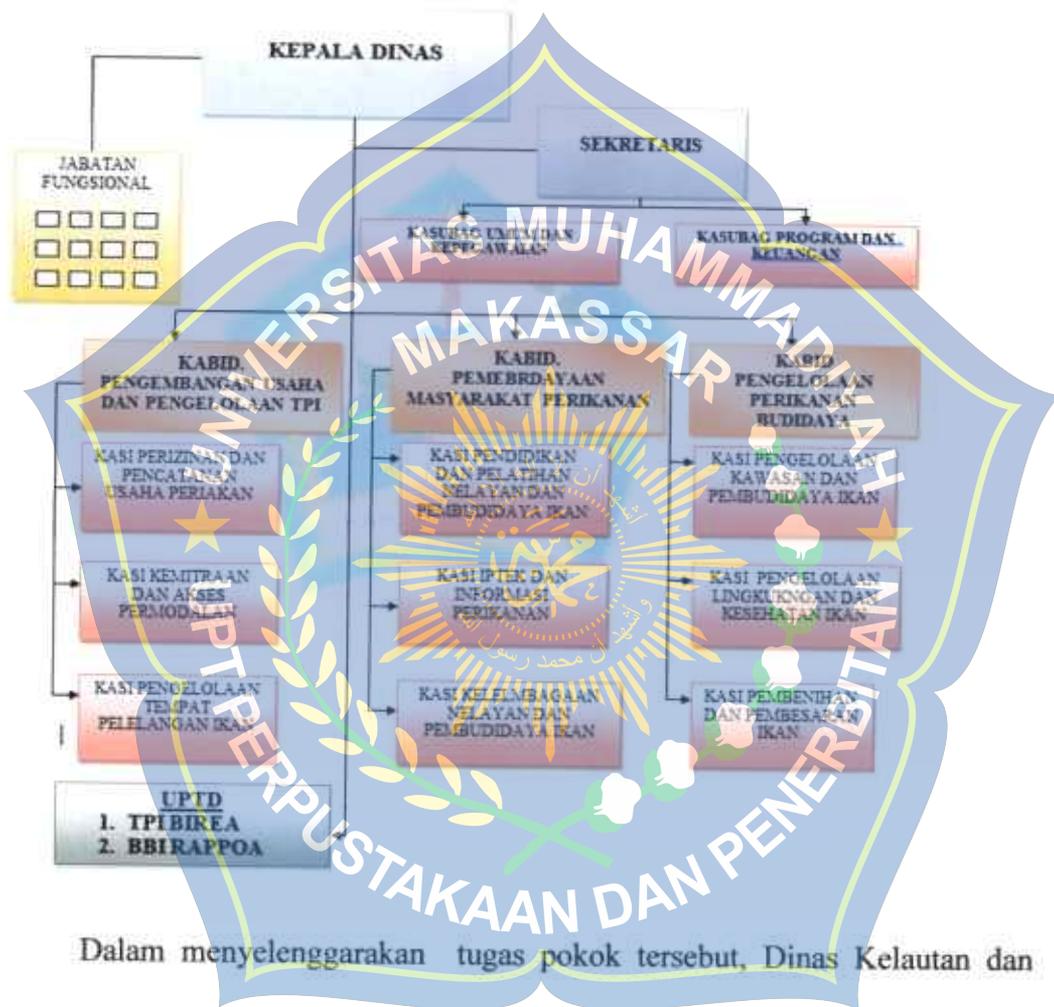
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubag Program dan Keuangan

- c. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan TPI
 - 1) Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha Perikanan
 - 2) Seksi Kemitraan dan Akses Permodalan
 - 3) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
 - 1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
 - 2) Seksi Iptek dan Informasi Perikanan
 - 3) Seksi Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan
- e. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1) Seksi Pengelolaan Kawasan dan Pembudidaya Ikan
 - 2) Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Ikan
 - 3) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2016, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng. Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantaeng, dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas berada di bawah koordinasi Sekretariat Kab. Bantaeng.

Dinas Perikanan Kabupeten Bantaeng adalah perangkat otonomi Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Bantaeng

sebagai berikut :



Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Fungsi:

- a. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategi dan program kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- c. Penyusunan rencana strategik bidang Perikanan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perikanan;
- e. Pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian tugas bidang Perikanan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategik dan program kerja bidang Perikanan;
- c. Menyelenggarakan kebijakan perizinan dan penerbitan SIUP pembudidayaan ikan skala kecil, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- d. Memberi bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
- e. Membina, mengarahkan, mengawasi, memberikan sanksi dan menilai prestasi kerja serta mengembangkan karier pegawai;
- f. Melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta melaporkan hasilnya kepada bupati;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab kepada Bupati.

B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik

Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng

Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

Produksi Budidaya Rumput Laut Salah satu komoditi andalan Kabupaten Bantaeng dari sektor budidaya perikanan adalah budidaya rumput laut. Aktivitas budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng dilakukan sepanjang pesisir Bantaeng yang melintasi tiga kecamatan Pesisir yaitu Kecamatan Bissapu, Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang. Produksi Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 menjadi tahun dimana produksi budidaya rumput laut mencapai angka 84.076/Ton ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya sebesar 9.693/Ton. Hal ini menunjukkan tingkat perkembangan produksi rumput laut yang sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Bantaeng.

Jenis komoditi rumput laut yang di budidayakan oleh para petambak rumput laut adalah jenis *eucheuma cottoni* dan *Sargassum sp.* Kedua jenis rumput laut ini memiliki harga yang cukup varian tetapi mampu menopang perekonomian RTP budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Komoditi

yang baik dan benar sehingga membawa keuntungan bagi petani rumput laut. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut masyarakat memberikan respon yang sangat baik karena dapat meningkatkan hasil produksi pertanian rumput laut mereka.” (Hasil Wawancara dengan RSP Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan peningkatan produksi bagi masyarakat sehingga melalui program tersebut masyarakat merespon baik arahan dari pemerintah.

Kegiatan budidaya rumput laut dengan luas pemanfaatan yang sangat berkembang, sehingga diperlukan pengaturan karena data penelitian menjelaskan bahwa budidaya telah menjorok ke laut hingga 3-4 Km. Pengembangan petani rumput laut sebenarnya merupakan tugas wajib pemerintah dalam mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Pa'jukukang telah memberdayakan masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Masyarakat petani rumput laut. Maka salah satu program yang ditempuh dalam melaksanakan pengembangan masyarakat tersebut adalah pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang. Hal ini pula sejalan dengan kebijakan Umum program Kabupaten Bantaeng. Disamping adanya kebijakan tersebut, strategi arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sangat sejalan yaitu mengembangkan kesempatan usaha dengan dukungan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang sangat

memadai. Seperti hasil wawancara dengan Kabid pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pendampingan:

“Sejauh ini masyarakat menganggap kehadiran pemerintah hanya sebatas kepada pelayanan administrasi saja sehingga tidak mempertimbangkan kegiatan-kegiatan pelayanan utamanya dalam kegiatan pertanian rumput laut. Jadi secara perlahan pemerintah tidak hanya hadir untuk membentuk regulasi terkait batas-batas pengelolaan rumput laut dan memberikan bantuan berupa alat untuk kegiatan pertanian rumput laut tetapi pemerintah harus hadir dalam melihat apa yang menjadi kendala masyarakat itu sendiri. Ternyata kelemahan masyarakat kami masih belum memahami tentang tata cara pengembangan rumput laut, sehingga di berikanlah penyuluhan, pendampingan, dibuatkan kelompok agar lebih mudah mengakomodir kegiatan pertanian masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan AA Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan kehadiran pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak hanya pada kegiatan pembuatan regulasi tetapi mempelajari kendala masyarakat dalam kegiatan pembudidayaan rumput laut.

Sebagai fasilitator pemerintah daerah membentuk pengetahuan dan keahlian masyarakat. Pendekatan ini untuk memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan baru dalam mengadopsi suatu perubahan berdasarkan karakteristik demografi masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini Bupati serta dinas kelautan dan perikanan telah melakukan suatu kegiatan di Kecamatan pa'jukukang yaitu pengembangan masyarakat petani rumput laut dengan meningkatkan kegiatan budidaya rumput laut. Pelaksanaan ini mendapat respon yang positif baik dari pemerintah dan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu Ketua Tani Rumput Laut di

Kabupaten Bantaeng terkait pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah lebih menyentuh kepada pemberian edukasi kepada masyarakat terkait upaya pengembangan budidaya rumput laut. Proses pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya telah lama direncanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kelautan serta pihak Camat sebagai penyedia sarana. Akan tetapi, pemerintah melakukan pembangunan disetiap sektor. Khususnya sektor kelautan dan perikanan dimulai pengembangannya yang diawali dengan pemberdayaan masyarakat khusus pesisir yang notabeneanya merupakan masyarakat yang bergelut di perikanan sebagai nelayan.” (Hasil Wawancara dengan SDB Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa masyarakat petani rumput laut telah lama menantikan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemberian pengetahuan terkait pembudidayaan rumput laut yang merupakan mata pencaharian dari masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan peran pemerintah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Desa Pa'jukukang mendapat hasil yang maksimum. Masyarakat yang telah sanggup mengembangkan bakatnya akan menjadi sumber daya manusia yang baru dimana keberadaannya sebagai manusia yang berpotensi mengeloh kreatifitasnya dan persediaan alam. Sebab jika dilihat dari sisi alam Kabupaten Bantaeng, untuk sektor Kelautan dan Perikanan potensi pembudidayaan rumput laut memang sangat cocok dengan kondisi alam dan gelombang laut Kabupaten Bantaeng.

Masyarakat Kabupaten Bantaeng dibagian pesisir umumnya masyarakat masih mengguluti aktivitas sebagai nelayan penangkap ikan. Sebagai imbasnya sebagian besar masyarakat mengeluhkan dengan

minimnya hasil tangkapan mereka setiap hari. Maka pada saat itu pula proses penangkapan ikan dikurangi dengan alasan tidak adanya area yang terbilang cukup baik untuk dijadikan wilayah penangkapan ikan. Melihat kejadian tersebut, masyarakat mencari solusi untuk beralih profesi dan pada saat itu pula kegiatan budidaya rumput laut dijadikan sebagai aktivitas terbaru bagi masyarakat di bagian pesisir laut.

Awalnya aktivitas ini memang sangat dirasakan sulit untuk dikembangkan oleh sebagian besar masyarakat pesisir, sebab aktivitas ini memerlukan pengetahuan mengenai prediksi cuaca dimana cuaca yang dimaksud adalah cuaca penanaman rumput laut yang masih baru. Hal ini dilakukan karena mengingat cuaca yang digunakan tidak sama dengan cuaca penangkapan ikan pada umumnya. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat dalam mengembangkan kegiatan budidaya dan pada tahun 2008/2009 masyarakat pesisir terbilang mampu mengembangkan budidaya mereka karena mampu memproduksi rumput laut yang masih basah sekitar 100 ton dari beberapa petani.

Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari masyarakat dan tentu dukungan dari beberapa elemen pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan keinginan masyarakat menjadi pemicu utama pencapaian masyarakat menggugah banyak perhatian utamanya bagi masyarakat pesisir yang masih bertahan sebagai nelayan tangkap untuk beralih profesi. Maka pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2010 dapat dikatakan bahwa masyarakat pesisir yang

berprofesi sebagai nelayan tangkap sudah tinggal hitungan jadi saja khususnya masyarakat pelaut di Desa Pa'jukukang.

Budidaya rumput laut seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat pesisir sebab pekerjaannya tidak serumit dengan nelayan tangkap pada umumnya. Hal ini dipertegas oleh salah satu Ketua Kelompok Tani Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng terkait kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengembangkan aktivitas budidaya rumput laut, yang mengatakan :

"Rumput laut yang kami kerjakan sekarang merupakan ladang baru bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Dikatakan ladang baru karena rumput laut ini mampu mengubah hidup para petani yang sebelumnya menjadi nelayan terbilang sulit untuk mendapatkan hasil tapi ketika beralih profesi sebagai petani rumput laut hasilnya melimpah. Memang pekerjaan ini awalnya sulit untuk masyarakat lakoni akan tetapi karena masyarakat disini terkenal ulet dan suka kerja keras Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Pemerintah pula yakni Bupati dan Kepala Dinas Kelautan serta Pak Camat memberikan pengarahan yang cukup menggembirakan bagi masyarakat petani karena diberikan bantuan berupa bibit dan petani yang berprestasi diberikan pembinaan khusus." (Hasil Wawancara dengan ADR Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan selain memberikan penyuluhan terhadap masyarakat pemberian bantuan sarana dan prasarana juga mendapat respon positif dari para petani rumput laut sebagai usaha pemerintah dalam mengurangi penangguran utamanya di wilayah pesisir Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan upaya pemerintah dalam membentuk strategi respon masyarakat melalui program pemberian bantuan sarana dan prasarana serta memberikan edukasi kepada masyarakat

pada perbaikan prasarana, pemerintah menuntut kepada jajaran pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Hasilnya adalah, banyak masyarakat mampu bersaing dan berproduksi tinggi terhadap apa yang mereka tekuni.

Sebagaimana penetapan Perda Bantaeng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan bagian kedua Pasal 3 yang berbunyi Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi para masyarakat pesisir untuk dapat mengembangkan tentang keahlian yang mereka miliki.

Baiknya suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah terhadap masyarakat secara cuma-cuma tidak akan berhasil begitu saja. Kadang terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di desa-desa. Untuk mengatasi masalah kendala tersebut, maka Pemkab Bantaeng dengan serangkaian melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap beberapa masyarakat secara intensif. Sebagai hasil yang dapat diperoleh adalah kualitas Sumber daya Manusia sangat meningkat yang diiringi dengan peningkatan produktifitas terhadapnya. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng terkait penyuluhan dan pendampingan terhadap beberapa masyarakat mengenai sumber daya manusia, yang mengatakan:

“Sebagai aparatur birokrasi yang bertindak dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kelautan seperti budidaya rumput laut tentu kami telah memiliki program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian rumput laut agar terus produktif. Salah satu caranya menyediakan pasar bagi para petani sehingga tidak perlu lagi mencari kemana hasil pertanian rumput laut akan dijual, termasuk bantuan modal usaha. Program-program tersebut di harapkan dapat memberikan kemudahan bagi petani rumput laut. (Hasil Wawancara dengan RSP Pada Tanggal 15 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan hasil produktivitas pertanian rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui bantuan modal usaha dan penyediaan pasar untuk menjual hasil pertanian rumput laut.

Berbagai langkah dapat di tempuh oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui strategi persuasif yang berupaya membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku masyarakat pesisir agar memanfaatkan potensi kelautan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.

Disamping penggalian potensi masyarakat pesisir, pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan bagi masyarakat agar penggunaan lahan wilayah pesisir di manfaatkan sebagai lahan yang dapat meraup keuntungan yang besar. Tidak tinggal diam, masyarakat pesisir yang rata-rata memiliki lokasi yang masih kosong dijadikan sebagai wilayah pertanian rumput laut. Dominannya dan besarnya pengaruh harga rumput laut dipasaran membuat warga pesisir meningkatkan produktifitas mereka dengan sebaik-baiknya. Seperti hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan masyarakat dalam

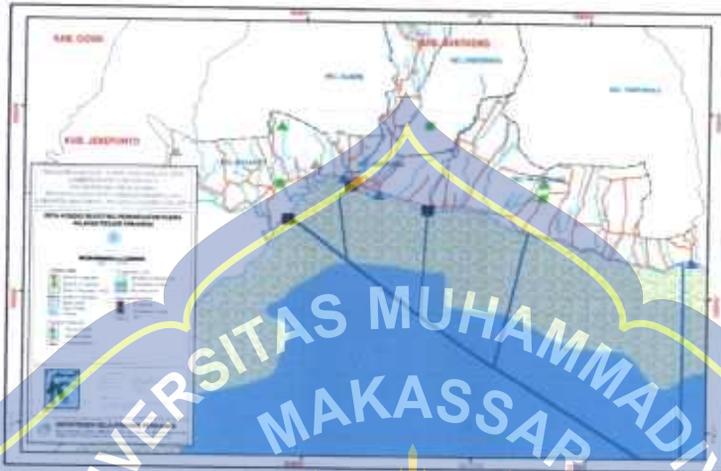
langkah meningkatkan potensi yang ada melalui pengembangan dan budidaya rumput laut:

“Dihimbau awalnya oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini disampaikan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa bagi warga yang memiliki lokasi kosong di wilayah pesisir sebaiknya digunakan sebagai lokasi penanaman rumput laut. Dengan alasan bahwa mengingat sebagian masyarakat pesisir banyak yang tidak produktif atau masih dalam kategori menganggur. Maka masyarakat pesisir mengikuti petunjuk pemerintah dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dapat dirasakan seperti sekarang ini.” (Hasil Wawancara dengan AA Pada Tanggal 15 September 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong peningkatan standar hidup masyarakat dengan melihat potensi yang tersedia di lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini pemegang kekuasaan tertinggi di daerah telah mengambil jalan yang tepat guna meningkatkan kepercayaan masyarakatnya sebagai masyarakat yang mampu memproduksi dari sisi pendapatan. Walaupun sebagian masyarakat merelakan lokasinya dijadikan sebagai sentra pertanian rumput laut di Kecamatan Pa'jukukang. Wilayah tersebut dapat dilihat dari peta berikut ini :

Gambar 4.2
Lokasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Pajukukang



Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, 2020

Pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri sehingga secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

Perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng semakin hari semakin meluas bahkan perkembangannya sangat signifikan dari awal hingga sekarang. Menurut perkembangan data yang telah diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng bahwa perkembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng telah menjorok kelaut dengan luas perkembangan hampir mencapai panjang 3-4 Km. Hal ini dipertegas oleh ketua kelompok tani rumput laut dalam sesi wawancara terkait perkembangan luas areal pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang menjadikan wilayah pesisir sebagai wilayah yang terbaik sebagai lokasi budidaya rumput laut, yang mengatakan bahwa :

“Budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng sangatlah tepat dan sesuai dengan kondisi alam serta gelombang lautnya. Sehingga

perkembangan yang terjadi sudah menjadikan rumput sebagai aktivitas tersibuk untuk masyarakat pesisir di beberapa wilayah di Kecamatan. Perkembangan ini pula tidak luput dari aktivitas yang dilakukan para petani yang semakin hari semakin menjadikan rumput laut sebagai bagian hidup masyarakat.” (Hasil Wawancara dengan SDB Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa wilayah di pesisir Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan bahwa wilayah yang sudah *leading sektor* karena mampu dijadikan sebagai sektor paling potensial di Kabupaten Bantaeng. Adapun wilayah yang menjadi basis potensial adalah wilayah Pa'jukukang karena di wilayah ini tumbuh petani rumput laut dengan sangat baik. Apabila dipersentasekan dari segi kependudukannya maka wilayah Pa'jukung sangat kecil akan tetapi pertumbuhan petani rumput laut sangat meningkat. Berikut persentase beberapa wilayah pesisir yang dijadikan sebagai kawasan pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Berikut ini wilayah yang termasuk dalam persentase wilayah budidaya rumput laut :

Gambar 4.3

Grafik Persentase Penduduk Pesisir Kecamatan di Kabupaten Bantaeng



Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bisappu dan Kecamatan Pajukukang merupakan 3 kecamatan pesisir dari 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng yang masuk dalam wilayah tersebut dengan aktivitas petani rumput laut. Dimana jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Bantaeng (39%), yang merupakan kecamatan yang berada di ibu kota Bantaeng dan menjadi petani rumput laut. Penduduk dengan mata pencaharian terbanyak dari sub sektor perikanan adalah di Kecamatan Pajukukang. Kecamatan pajukukang dapat dikatakan bahwa 90% masyarakatnya terlibat dalam proses pembudidayaan rumput laut.

Berikut ini data yang diperoleh dari beberapa dinas terkait mengenai sebaran masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidayaan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Persentase Jumlah Penduduk Petani Rumput Laut Wilayah Kecamatan Pesisir

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah	%
		L	P		
1	Bantaeng	19.876	20.073	39.949	39.0
2	Bisappu	15.923	16.077	32.000	31.2
3	Pajukukang	15.137	15.410	30.547	29.8
	Total	50.936	51.560	102.496	100

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa kecamatan yang dominan memiliki penduduk terbanyak petani rumput laut adalah kecamatan Bantaeng, menyusul Kecamatan Bissappu dan kemudian menyusul Kecamatan Pajukukang. Akan tetapi Kecamatan Pajukukang untuk sekarang ini memiliki prioritas utama dalam pembudidayaan rumput laut. Sebab Kecamatan Pajukukang dijadikan sebagai wilayah percontohan dan lokasi

observasi terhadap rumput laut di Kabupaten Bantaeng dan umumnya di Sulawesi Selatan.

Pengelolaan usahatani tidak terlepas juga dari masalah modal. Penguasaan aspek permodalan merupakan hal yang sangat penting bagi petani. Aspek permodalan yang dimaksud adalah bagaimana petani membagi dan menentukan jumlah modal yang diperlukan pada setiap kegiatan usahatani, seperti budidaya, penggunaan tenaga kerja dan pemasaran hasil, karena kebutuhan akan modal berbeda-beda untuk setiap fase produksi karena itu petani harus mampu mengatur jumlah modal yang diperlukan agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Petani yang kompeten harus mampu pula menentukan dan memilih sumber modal agar dapat menjamin keuntungan dan keamanan usahatannya. Karena itu petani perlu memiliki pengetahuan tentang cara-cara memperoleh modal, misalnya melalui lembaga keuangan pemerintah ataupun swasta yang dapat memberikan pinjaman dan bunga rendah serta persyaratannya mudah. Sifat alamiah rumput laut mempengaruhi lamanya perputaran modal. Apabila jenis rumput laut yang dibudidayakan mengalami kerusakan karena diserang hama.

Salah satu program dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bantaeng dalam memberikan peningkatan hasil produksi pertanian rumput laut masyarakat dengan menyediakan produsen yang siap membeli hasil produksi pertanian rumput laut masyarakat. Para produsen langsung mendatangi masyarakat secara langsung sehingga para petani rumput laut

Selanjutnya adalah perlunya penyediaan sarana dan prasarana sehingga akses untuk mencapai lokasi budidaya rumput laut terbilang mudah dijangkau.

c. Strategi Pasar

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Yang dimaksudkan strategi pasar dalam penelitian ini yaitu petani rumput laut harus konsisten dan memilih produk rumput laut unggulan dalam mengembangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas panen sehingga dapat memperoleh keuntungan.

Dengan letaknya di pesisir pantai jazirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng memiliki panjang pantai sekitar 27,5 Km yang membentang dari Timur hingga ke Barat. Di sepanjang pantai inilah dapat ditemukan jejeran petani yang menggeluti dunia perikanan yaitu rumput laut. Namun hal ini tidak memberikan kenyamanan bagi para petani walaupun terkenal sebagai masyarakat yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal yaitu pembudidayaan rumput laut. Masalah yang paling di rasakan oleh para petani adalah tidak adanya harga yang secara konstan untuk penjualan rumput laut. Ketidakjelasan informasi harga ini menjadikan petani hanya mampu memperoleh pendapatan yang tidak sepadan dengan jerih payah yang dilalui setiap hari.

Untuk jelasnya, para petani hanya mampu memperoleh harga jual dari penjual pengumpul bukan dari harga yang sebenarnya. Namun karena petani

buta harga pasar yang sebenarnya maka mau tidak mau petani hanya dapat menurut dengan harga yang telah ditentukan oleh para pembeli pengumpul. Dengan ini, hasil wawancara peneliti dengan salah satu pembeli rumput laut pengumpul di daerah setempat terkait harga jual rumput laut adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya petani rumput laut tidak pernah mendapat informasi harga yang sesuai dengan harga pasar. Hal ini dialami karena tidak adanya perilaku yang terbuka dan transparan kepada para petani rumput laut. Sehingga jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah para petani hanya pasrah menjual hasil panen kepada para pengumpul yang hanya mendapat harga lokal yang terbilang sangat murah” (Hasil Wawancara dengan AA Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan memberikan informasi bahwa memang harga untuk rumput laut di Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan bahwa para pembeli tidak melakukan persaingan secara bebas. Akan tetapi para pembeli lebih banyak mengambil jalan monopoli dengan melakukan pembelian langsung di lokasi panen. Di samping itu, para pembeli tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai harga yang berlaku di pasar yang sebenarnya. Tentu hal ini menjadi kerugian yang cukup besar terhadap para petani rumput laut. Harapan yang perlu dan sangat diinginkan oleh para petani adalah adanya informasi harga yang jelas dan sesuai harga yang berlaku.

Masalah pemasaran merupakan salah satu dari banyak masalah yang dihadapi perusahaan sehari-hari sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, pada masa sekarang ini. Kegiatan pemasaran dalam situasi perekonomian sekarang ini tidak terlepas dari persaingan yang datang dari

perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau serupa, sehingga mengakibatkan adanya persaingan yang datang dari perusahaan lokal yang menyebabkan konsumen mempunyai banyak kesempatan untuk memilih dan menentukan hasil produksi mana yang sesuai dengan selera konsumen atas suatu produk.

Kurangnya transparansi terkait informasi harga yang disampaikan kepada petani rumput laut meliputi beberapa aspek. Di antaranya, informasi itu harus resmi dan jelas sumbernya. Bagusnya, informasi harga itu mencakup semua tingkatan. Misalnya, berapa harga di tingkat pedagang pengumpul, berapa di tingkat pedagang besar yang di Bantaeng atau Makassar, dan berapa harga pembelian pabrik di Makassar, serta berapa pembelian pengusaha eksporter. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu ketua petani rumput laut mengenai informasi harga jual rumput laut dari berbagai level yang mengatakan bahwa:

“Informasi harga dari berbagai level ini akan membantu petani untuk memasang berapa harga yang seharusnya berlaku di tingkat petani. Bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang pengumpul, akan tetapi lebih mendorong terjadinya proses jual-beli atau tawar menawar yang sehat. Bukan hanya itu, perlu pula informasi berapa jumlah pedagang pengumpul dan pedagang besar yang ada di Bantaeng supaya petani mempunyai posisi tawar untuk menjual produksinya. Selanjutnya instansi terkait menyebarkan informasi-informasi itu” (Hasil Wawancara dengan ADR Pada Tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kurang transparannya harga rumput laut membuat petani merasa kesulitan dalam melakukan manajemen terkait usaha pertanian mereka. Dengan demikian

pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu menentukan harga eceran tertinggi bagi kegiatan usaha rumput laut.

Studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Mempelajari secara mendalam artinya mengkaji secara sungguh-sungguh dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis.

Permasalahan naik turunnya harga rumput laut membuat produsen yang membeli hasil pertanian rumput laut masyarakat juga menyeimbangkan jumlah pembelian mereka dengan harga pasar yang telah ditetapkan, terlebih beberapa kendala petani seperti serangan hama membuat hasil produksi petani cenderung menurun. Sebagaimana hasil wawancara dengan perusahaan yang membeli hasil produksi rumput laut masyarakat yang mengatakan:

“Tentu sebagai perusahaan yang membeli hasil pertanian rumput laut masyarakat kami menyediakan harga sesuai dengan kualitas rumput laut yang ada, hal tersebut sesuai dengan permintaan pasar yang cenderung memperhatikan kualitas dan kuantitas. Hal tersebut cenderung membuat pihak kami menaikkan atau menurunkan harga, ada banyak faktorlah yang membuat harga naik atau turun itu tergantung kebijakan pemerintah juga. Terlebih berbagai penyakit yang menyerang rumput laut membuat kualitasnya berkurang.” (Hasil Wawancara dengan SLM Pada Tanggal 19 September 2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan persoalan harga pasar terkait pembelian hasil rumput laut dari petani bergantung kepada kualitas dan kebutuhan pasar global. Berbagai macam penyakit yang menyerang rumput laut akan terjadi penurunan kualitas sehingga para

produsen juga cenderung membeli hasil pertanian rumput laut dengan harga yang murah.

Lain halnya dengan Kelompok Tani Rumput Laut yang mengakses langsung informasi harga dan pasar. Kelompok ini sudah bermitra dengan koperasi dan beberapa perusahaan pengolahan rumput laut di Makassar, di antaranya PT Bantimurung Indah anak perusahaan PT Bosowa. Malah, kelompok ini sering membeli rumput laut ke petani di luar kelompoknya untuk memenuhi permintaan pasar. Areal pengembangannya sudah mencapai 10.000 bentangan dengan kapasitas produksi mencapai 20 ton per bulan. Kadang mereka juga memanfaatkan internet untuk memperkenalkan produknya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait strategi pasar yang di lakukan oleh pemerintah dalam mendukung budidaya pertanian rumput laut masyarakat masih terdapat beberapa kendala termasuk belum adanya kejelasan informasi kepada para petani terkait kepastian harga dari rumput laut. Selain itu pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu melakukan perbaikan dengan memberikan legalitas dan izin kepada para produsen yang akan membeli hasil produksi masyarakat, dimana para produsen tersebut semakin banyak dan membeli dengan kisaran harga yang berbeda pula. Tentu persaingan pasar tersebut akan mempengaruhi pendapatan daerah jika tidak segera di selesaikan oleh para pemangku kebijakan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng

Keberhasilan yang di capai oleh Pemerintah Bantaeng dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut tentu memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Untuk itu, berikut ini beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng

1. Faktor Pendukung

a. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat petani rumput laut adalah merupakan usaha mandiri pemerintah Kabupaten Bantaeng. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa rumput laut merupakan kegiatan yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan ini tidak dapat berjalan apabila dalam kegiatan ini tidak ada yang memfasilitasi termasuk pelatihan yang diberikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kabid pemberdayaan masyarakat perikanan terkait pemberian edukasi terhadap masyarakat:

“Hal yang paling penting dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat itu sendiri tentang metode pengembangan rumput laut agar terus berlangsung demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sehingga melalui itu kami bekerjasama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan.” (Wawancara dengan AA tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan beberapa instansi termasuk lembaga perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan serta edukasi kepada masyarakat terkait budidaya rumput laut yang baik dan benar.

Peran pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah, masyarakat di perhatikan untuk kemudian di kembangkan potensi dirinya. Sehingga pemerintah tertarik melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pendampingan praktek secara langsung dan pemberian materi berupa tata cara penangan rumput laut melalui seminar-seminar bersifat nasional. Selain dari kegiatan tersebut, pemerintah memberikan inovasi-inovasi yang cukup mendukung proses perkembangan petani rumput laut misalnya dengan menggunakan bibit unggul yang berasal dari pemerintah, penanaman rumput laut dengan cara pemilihan air laut yang sesuai, dan pelaksanaan panen yang sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng ini berharap dapat dioptimalkan oleh masyarakat petani rumput laut. Sebab hasil dan dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat petani rumput laut itu sendiri. Dimana dampak ini akan dirasakan secara langsung melalui perbaikan kualitas perekonomian masyarakat itu sendiri. hal tersebut di ungkapkan oleh ketua kelompok tani terkait pentingnya program pemberdayaan masyarakat petani rumput laut:

“Parisipasi aktif dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut perlu di kembangkan dalam mendukung program

pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan melalui penyuluhan serta pendampingan agar kegiatan pertanian rumput laut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut.” (Wawancara dengan ADR tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat adanya harapan agar masyarakat benar-benar terlibat aktif dalam merealisasikan arahan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam rangka pembudidayaan rumput laut yang baik dan benar.

b. Kebijakan Pemerintah

Dengan bergulirnya reformasi, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar menciptakan masyarakat yang mandiri, baik dibidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Maka diperlukan konsep pemberdayaan yang berbasis kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dimana diperlukan peran pemerintah dalam penanganan dengan baik agar masyarakat dapat bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang pemberdayaan masyarakat pesisir tertuang dalam Perda Kabupaten Bantaeng yang mengarahkan masyarakat agar benar-benar mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar masyarakat sehingga benar-benar mampu menjadi komoditi yang meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh kepala dinas perikanan dan kelautan tentang program peningkatan kesejahteraan petani rumput laut:

“Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi acuan bagi kami agar terus bekerja dengan membuat regulasi-regulasi yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan para petani rumput laut.” (Wawancara dengan RSP tanggal 15 Agustus 2015)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat berdasarkan perda Kabupaten Bantaeng No 9 Tahun 2013 menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi guna meningkatkan hasil produktivitas masyarakat melalui pertanian rumput laut.

Dengan adanya Peraturan Daerah diatas, pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai gerakan untuk mengaplikasikan Peraturan Daerah tersebut. salah satunya adalah pengembangan masyarakat pesisir di wilayah Pa'jukukang sebagai petani rumput laut yang handal dan berproduksi. Terbukti, dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, petani rumput laut di wilayah pa'jukukang telah berhasil menjadi petani yang baik dari sisi pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemerintah mampu mengaplikasikan Peraturan Daerah dengan baik untuk kepentingan dan kebaikan dari pada masyarakatnya sendiri.

Hal ini pula yang coba di aplikasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dimana dalam visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng pelaksanaan Perda tersebut perlu mendapatkan hasil yang lebih besar. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan pemerintah dan jajarannya adalah merupakan hak dan tugas pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor pendukung dalam strategi pengembangan budidaya genetik rumput laut dilihat dari dua hal yaitu penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami terkait budidaya rumput laut dan kebijakan pemerintah yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan pertanian rumput laut menjadi acuan bagi para petani agar benar-benar menjalankan komoditi pertanian rumput laut secara baik dan benar sebagai kegiatan yang dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi publik untuk mencapai tujuan dan sasarannya, karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia adalah mengenai penempatan kerja aparatur.

Sumber Daya menjadi faktor penghambat utama bagi keberlangsungan kegiatan usaha masyarakat petani rumput laut karena sumber daya manusia yang handal sangat kurang. Hasilnya adalah tidak adanya kegiatan tambahan bagi masyarakat dan tertutupnya masyarakat dengan dunia luar. Hal ini menjadi jelas, karena masyarakat petani rumput laut hanya berharap bantuan penuh dari masyarakat dan bimbingan dari

Dinas Kelautan dan Perikanan. Dampak lain adalah stok rumput laut yang terus menurun sehingga belum dapat dikatakan dalam skala nasional karena Kabupaten Bantaeng belum mampu mengimpor rumput laut keluar daerah. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bantaeng tentang kebutuhan sumber daya manusia:

“Sekarang ini kami sedang membentuk tim yang bertugas untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat melakukan budidaya genetik terhadap rumput laut menjadikan perlu adanya kegiatan pendampingan yang benar-benar fokus menjalankan kegiatan pertanian rumput laut.” (Wawancara dengan RSP tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor sedikit terhambatnya kegiatan budidaya secara genetik terhadap rumput laut yang menjadikan upaya dalam peningkatan hasil produksi pertanian tidak sesuai dengan target yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Lembaga pemerintahan tanpa didukung karyawan yang sesuai baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menunjang tugas yang menjadi tanggungjawab organisasi.

Pada dasarnya tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan pada sektor kelautan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Tetapi orientasi kerja lembaga tersebut tidak hanya memperhatikan tentang pertanian rumput laut semata namun semua komoditi ekonomi masyarakat

di bidang kelautan juga harus di perhatikan sehingga perlu membentuk lembaga khusus yang menangani budidaya rumput laut. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan ketua kelompok tani tentang pentingnya manajemen dalam pengelolaan pertanian rumput laut:

“Kegiatan pertanian rumput laut selain membuka akses perekonomian bagi masyarakat juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Tentu potensi ini harus serius untuk di perhatikan oleh pemerintah. Sehingga di berbagai kesempatan saya selalu mendorong agar pemerintah membuat sebuah lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberdayaan atau pendampingan kepada masyarakat. Kelompok tersebut benar-benar adalah orang yang memahami budidaya rumput laut, saya fikir dengan seperti itu dapat meningkatkan produksi rumput laut di Bantaeng.” (Wawancara dengan SDB tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa perlunya dibentuk lembaga khusus yang benar-benar bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap proses budidaya rumput laut guna menjaga ketahanan komoditi tersebut dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Akses yang Tidak Menentu

Disamping kurangnya sumber daya manusia bagi petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng, penghambat lain adalah tidak adanya akses yang menentu untuk melakukan kerjasama dengan jaringan yang lebih besar. Hal ini sangat diprihatinkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bantaeng, dan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bantaeng masih mencari kerjasama di bidang perdagangan utamanya perdagangan rumput laut dengan pihak lain yang lebih siap dan bersedia. Seperti hasil wawancara

dengan kepala dinas kelautan dan perikanan tentang relasi guna meningkatkan daya jual petani rumput laut:

“Berbagai proses negosiasi telah pemerintah lakukan dengan membangun jejaring kerjasama dengan perusahaan mancanegara yang bergerak dalam industry pengolahan rumput laut, sekarang sudah sampai kepada tahap observasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dengan kerjasama tersebut tentu akan memberikan pemasukan yang lebih baik bagi masyarakat.” (Wawancara dengan RSP tanggal 15 Agustus 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam membangun kerjasama dengan perusahaan berstandar internasional yang tertarik dalam memasok rumput laut di Bantaeng sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani rumput laut.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan yang menjadi faktor penghambat strategi pengembangan budidaya genetik rumput laut dilihat dari dua aspek yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak mempunyai lembaga yang benar-benar fokus dalam memberikan pendampingan terhadap kegiatan pertanian rumput laut. Selanjutnya akses yang tidak menentu, naik turunnya harga karena monopoli pasar yang dilakukan oleh beberapa pengusaha yang membeli hasil pertanian rumput laut masyarakat dengan demikian pemerintah Kabupaten Bantaeng mencoba membangun komunikasi dengan perusahaan yang berstandar internasional agar apa yang menjadi harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pertanian dapat benar-benar terwujud.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng terlaksana dengan baik melalui acuan tiga indikator yaitu:
 - 1) Strategi respon masyarakat, keinginan masyarakat dalam mendapatkan standar kehidupan yang baik melalui kegiatan pertanian rumput laut menjadikan pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang membuat masyarakat memberikan respon yang positif dan ikut berpartisipasi dalam program tersebut.
 - 2) Strategi Organisasi, pemerintah daerah telah melakukan regenerasi dari para petani untuk mengajarkan ilmu budidaya kepada para generasi penerus sehingga aktivitas pembudidayaan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dunia.
 - 3) Strategi Pasar, pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu melakukan perbaikan dengan memberikan legalitas dan izin kepada para produsen yang akan membeli hasil produksi masyarakat, dimana para produsen tersebut semakin banyak dan membeli dengan kisaran harga yang berbeda pula.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya genetik rumput laut di Kabupaten Bantaeng.
 - 1) Faktor pendukung dari pemerintah adalah proses pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para petani secara berkelanjutan dan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng tentang pemberdayaan masyarakat pesisir tertuang dalam Perda Kabupaten Bantaeng.
 - 2) Faktor penghambatnya yaitu tidak adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam setiap sektor pembangunan sehingga perlu adanya gerakan penyuluh dalam mendampingi masyarakat. penghambat lain adalah tidak adanya akses yang menentu untuk melakukan kerjasama dengan jaringan yang lebih besar dalam pengembangan rumput laut di Kabupaten Bantaeng.

B. Saran

1. Strategi bagi daerah harus lebih dikembangkan sehingga pembangunan daerah dapat bertahan lebih lama dan menjadi pusat percontohan untuk daerah-daerah lain.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sepantasnya dapat berhasil dan mampu dinikmati oleh masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten bantaeng



3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan mengambil tema yang sama akan tetapi seharusnya lebih memfokuskan pada analisis dampak pengolahan rumput laut di Kabupaten Bantaeng. Sehingga dapat diketahui bagaimana dampaknya terhadap pemerintah dan terhadap konsumen serta terhadap petani rumput laut itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2011). *Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan*. Alfabeta.
- Akrim, D., Dirawan, G. D., & Rauf, B. A. (2019). Perkembangan Budidaya Rumput Laut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Di Indonesia. *UNM Environmental Journals*, 2(2), 52–56.
- Aliyanti, T. N. (2019). *Implementasi strategi STP (Segmentasi, Targeting, Positioning) di PT. Mina Wisata Islami Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Anwar, A. (2013). Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Usaha Rumput Laut Euchema Cottonii Di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Octopus*.
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87-100.
- David, F. R. (2012). *Strategic Management : Manajemen Strategis konsep* (cet. 12). Salemba Empat.
- Fiandana, Y. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*.
- Hadiyan, Y., & Haryjanto, L. (2018). Strategi Konservasi Sumberdaya Genetik Jenis Tanaman Potensial Mendukung Restorasi Gambut. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek Ke-3*.
- Heene, A., Desmidt, S., Afiff, F., & Abdullah, I. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. PT. Refika Aditama.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *SHARE: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Isnaini, R. (2017). Rumput laut sebagai Bahan Pengental Pengganti Bleng dalam Pembuatan Kerupuk Karak yang Aman bagi Kesehatan. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 1(1), 53-68.
- Muhyadi, M. (2015). Teknik Pengambilan Keputusan. *EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v3i2.3796>
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*.
- Nofriya, N. (2015). Pendayagunaan Sumber Daya Genetik Rumput Laut Sebagai Sumber Energi Alternatif di Masa Depan. *Jurnal Dampak*, 12(1), 38-47.
- Nontji, M. (2013). Increasing Soybean (*Glycine max L*) Drought Resistance With.

- Modern Applied Science*, 7(9).
- Nur, M., Bulkis, S., Darma, R., & Tuwo, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Petani Rumput Laut di Desa Murante Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. *Jurnal Rumput Laut Indonesia*, 2(1).
- Nurdjana, M. (2010). Membangkitkan Kejayaan Indonesia Sebagai Negara Maritim. *Seminar Nasional. FIKP Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Qodriyatun, S. N. (2017). Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Sdg). *Kajian*, 21(1), 141-159.
- Ridwan, A. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Sumber Daya Genetik Lokal Jambi. In *Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal*, (pp. 14-24).
- Rizkita, W. H., & Hakim, H. L. (2018). Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Batik Karawang di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 116-127.
- Rohayatin, T. (2017). Strategi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah : Menuju Era Globalisasi. *Jurnal Transformatif*.
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo.
- Sari, N. A. (2015). *Penentuan Strategi Pemasaran Melalui Analisa Swot Dalam Peningkatan Daya Saing Di Cv. Global Warna Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Serdiati, N., & Widiastuti, I. M. (2010). Pertumbuhan dan produksi rumput laut *Euचेuma cottonii* pada kedalaman penanaman yang berbeda. *Media Litbang Sulteng*, 3(1).
- Sudayanto, Ragimun, dan Rahma, R. (2011). Starategi pemberdayaan UMKM menghadapi pasar bebas ASEAN. *Universitas Negeri Jember*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Rajawali Pers.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



(Dokumentasi Lokasi penelitian di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng)



(Dokumentasi Lokasi penelitian di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng)



(Dokumentasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya)



(Dokumentasi dengan Ketua Kelompok Tani Rumput Laut)



(Dokumentasi dengan Pengumpul Rumput Laut)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221
Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

Nomor : 656/FSP/A.1-VIII/V/41/2020
Lamp. : 1 (satu) Lampiran
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Wisma Wardhani
Sta mb uk : 105641115616
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 19 Mei 2020

Ketua Prodi,

Dr. Nuryanti Mustari S.I.P., M.Si
NBM. 1081 102



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
R. Sultan Abdulkin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: dip@ummh.com



TERAMPIL
MAY 2020

mor : 442/05/C.4-VIII/V/41/2020

np : 1 (satu) Rangkap Proposal

1 : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bantaeng

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di-

Bantaeng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 656/FSP/A.1-VIII/V/41/2020 tanggal 28 Mei 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : WISMA WARDHANI

No. Stambuk : 105641115616

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

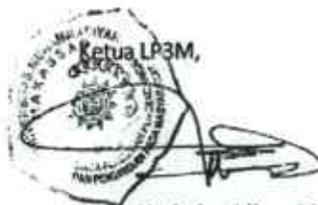
"Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Karib No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmmp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmmp.bantaengkab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/88/IPL/DPM-PTSP/VI/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: WISMA WARDHANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
NIM	: 105641115616
No. KTP	: 7311014211980001
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Pesisir Desa Lempang Kec. Tanete Riata Kabupaten Barru

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng"

Lokasi Penelitian : Dinas Perikanan dan Kelautan
 Lama Penelitian : 01 Juni 2020 s.d. 30 Agustus 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



1 2 0 2 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 8 8



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
 Pada tanggal : 01 Juli 2020
 a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 u.b. Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

FATMAWATI ST., MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19760307 200502 2 004

RIWAYAT HIDUP



WISMA WARDHANI, lahir pada tanggal 2 November 1998 di Sikapa tepatnya di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, anak Pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan H.Syahril dan Hj.Wahidah. Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 24 Kampung Tangnga Kab. Luwu pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2011. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Belopa Kabupaten Luwu dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Belopa dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat SMA penulis langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui penerimaan mahasiswa jalur mandiri dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi strata satu Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pernah mengikuti Darul Arkam Dasar (DAD) Muhammadiyah. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S.1 Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Genetik Rumput Laut di Kabupaten Bantaeng. Semoga dengan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari Universitas Muhammadiyah Makassar di masyarakat.